

# Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin

Hairi Firmansyah

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unlam  
Jl. Jend. A. Yani Km. 36 PO BOX 1028 Banjarbaru 70714

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the achievement of empowerment indicators (degree and empowerment bases) Fakir's of poor Empowerment Program (P2FM). This study was a survey research. Respondents of this study amounted to 30 people taken to the sample multistage random sampling techniques (stratified simple random). The sample were subjected to community members or beneficiaries the Fakir's of poor Empowerment Program (P2FM) in the helder Banjarmasin City. The results showed that the achievement of empowerment indicators (degree and empowerment bases) on the Fakir's of poor Empowerment Program (P2FM) which was conducted in the Banjarmasin City not able to empower the target communities or beneficiaries of the program, so not worth mentioning as the community empowerment program.*

Keywords : Indicators of empowerment (degree and empowerment bases), Fakir's of poor Empowerment Program (P2FM)

## Pendahuluan

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan selama ini belum pernah memuaskan. Pengurangan jumlah penduduk miskin tidak signifikan peningkatan anggaran yang disediakan. Ketidakpuasan ini kian mengganggu, karena ada hasil amatan yang menunjukkan tentang makin fenomenalnya penduduk atau keluarga yang "miskin-kembali."

Munculnya gejala "miskin-kembali" menguatkan beberapa dugaan

yang selama ini berkembang, seperti misalnya, program mulya tersebut terperangkap dalam logika "proyek" yang mementingkan kerapihan pertanggungjawaban administratif (*administrative accountability*), yakni seberapa besar anggaran yang disediakan dan seberapa banyak kegiatan atau program dilaksanakan, daripada pertanggungjawaban sosialnya, yakni seberapa besar perubahan positif yang signifikan terjadi secara berkelanjutan pada kelompok sasaran., seperti terlihat pada lampiran1.

Secara jelas menggunakan istilah pemberdayaan, tetapi program ini adalah transformasi dari program di Kementerian yang sama yang bernama KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Tetapi apakah perubahan nama akan diikuti oleh kemampuan program untuk memberdayakan masyarakatnya sasarannya?

Berdasarkan rasionalisasi ini patut dipersoalkan, apakah layak program yang berubah nama tersebut menyandang konsep pemberdayaan? Ataukah suatu langkah yang digunakan hanya untuk mengakali masyarakat bahwa mereka telah di berdayakan. Jika pun berhasil bagaimana derajat keberdayaan masyarakat yang dapat dicapai dan dengan basis keberdayaan sekuat apa?

Penelitian ini mengkaji persoalan di atas dengan fokus analisis pada masalah. apakah program-program tersebut mampu mencapai indikator-indikator pemberdayaan yang diidealkan secara konseptual dalam teori pemberdayaan masyarakat? Jika ya, maka program-program itu masih layak disebut sebagai program pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis ketercapaian indikator-indikator keberdayaan (derajat dan basis keberdayaan) Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin .

### **Tinjauan Pustaka**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan (*post-developmentalism paradigm*), yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Paradigma pemberdayaan masyarakat lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Kartasasmita, 1997). Intinya adalah *agency, self-determination, dan self-help* dengan basis sustainability.

Menurut Sumodiningrat (2002), upaya memberdayakan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, ia harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). *Ketiga*,

ia juga mengandung pula arti melindungi. Menurut Ife (2002), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan (Soeharto, 2008), yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan (Friedman, 1992), yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat

- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) adalah program pemberdayaan masyarakat yang berupaya memberdayakan masyarakat sarannya melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut, penelitian merumuskan hipotesis, sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin diduga kuat tidak optimal memberdayakan masyarakat, dan karena itu tidak layak disebut program pemberdayaan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian survei dan studi pustaka. Penggunaan metode survei ditujukan untuk mempresentasikan fenomena yang diteliti dengan mengandalkan data cuplikan atau studi sample yang digunakan. Populasi penelitian ini adalah seluruh

sasaran program P2FM di Kota Banjarmasin

Metode pengambilan *sample* menggunakan teknik *multistage sample random sampling* (acak sederhana bertingkat) dimulai dari pemilihan Kecamatan pelaksana program, Kelurahan atau Desa pelaksana program, kelompok pelaksana program dan yang terakhir individu pelaksana program. Jumlah *sample* yang diambil 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dipilih secara *purposive*, karena kota ini merupakan salah satu daerah yang pertama kali melaksanakan program P2FM dari tahun 2009 sehingga hasilnya sudah dapat di lihat.

Sebagai penelitian *survey*, penelitian ini mengandalkan kuesioner sebagai instrumen utama. Instrumen ini disusun berdasarkan kajian pustaka tentang indikator-indikator keberdayaan.

Pengkajian masalah penelitian ini membutuhkan peubah-peubah penelitian, yang disusun berdasarkan kajian pustaka tentang pemberdayaan masyarakat. Secara umum, peubah penelitian ini adalah Tingkat keberdayaan, yang terdiri atas dua indikator, yaitu :

- a) Derajat keberdayaan
- b) Basis keberdayaan

Analisis data dalam penelitian menerapkan analisis kuantitatif dengan bantuan statistik deskriptif (rata-rata, median, dan indeks).

## Hasil Penelitian

### ***Derajat keberdayaan Masyarakat***

Indikator derajat keberdayaan masyarakat tingkat dan tingkatan keberdayaan sebagai akibat langsung dan tidak langsung program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menetapkan empat parameter derajat keberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power within*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power to*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Secara konseptual, empat parameter ini tersusun secara gradual; parameter *power with* merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tiga parameter lainnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program pemberdayaan masyarakat baru bisa dianggap berhasil ketika ia mampu mewujudkan *power with* pada kelompok sasaran. Namun demikian, parameter-parameter lainnya – meskipun tingkatannya lebih rendah – dianggap sebagai *entry-point* untuk mewujudkan *power with*. Parameter ini menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keber-

dayaannya sendiri (parameter 1 – 3), tetapi juga mampu memberdayakan orang/keluarga lain di komunitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin belum mampu mengoptimalkan potensi *power with* (indeksnya di bawah 50%) kelompok sasaran, meskipun sudah cukup optimal meningkatkan tiga parameter di bawahnya. Grafik ini menunjukkan, Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat (IDK) pada parameter kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*) baru mencapai 61,96%, sedikit lebih tinggi dari ambang batas IDK minimal (50%). Demikian juga dengan parameter lainnya.

Temuan-temuan penelitian ini menggambarkan bahwa Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) selama ini belum mampu mengoptimalkan derajat keberdayaan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tingkatan yang paling tinggi dari pemberdayaan masyarakat (*power with*) tidak tercapai. Berdasarkan pada temuan ini dapat dikemukakan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang selama ini dilaksanakan belum layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat, seperti yang diduga dalam hipotesis penelitian ini.

### ***Basis Keberdayaan Masyarakat***

Kalau derajat keberdayaan menggambarkan ketercapaian tingkat dan tingkatan keberdayaan, maka

basis keberdayaan menggambarkan jaminan keberlanjutan derajat keberdayaan yang sudah diwujudkan (bukan programnya yang *sustainable*, tetapi dampak positif/perubahan positif pada kelompok sasaran). Penelitian ini menetapkan lima parameter basis keberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan.
- c. Partisipasi masyarakat.
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari lima parameter basis keberdayaan hanya satu basis keberdayaan yang sedikit lebih tinggi dari ambang batas minimal (50%), yakni tingkat partisipasi penduduk.

Kasus di Kota Banjarmasin. Setidak-tidaknya menunjukkan bahwa, parameter pengembangan sumberdaya berbasis masyarakat – selain partisipasi penduduk -- sudah mulai tergarap, meskipun program ini belum mampu merintis keberlanjutan manfaat/keberdayaan, modal sosial, dan ketimpangan gender.

Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa program pemberdayaan masyarakat paling mudah "menggarap" partisipasi penduduk dan mulai mampu merintis pengembangan sumberdaya lokal, tetapi tidak mampu memelihara modal sosial dan mengatasi

ketimpangan gender untuk keberlanjutan manfaatnya.

Dari indikator ini program-program pemberdayaan masyarakat juga dapat dinilai belum layak disebut program pemberdayaan masyarakat, seperti diduga kuat oleh hipotesis penelitian ini. Prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih diabaikan.

### ***Tingkat Keberdayaan Masyarakat Komposit***

Seperti dikemukakan di atas, tingkat keberdayaan masyarakat merupakan gabungan antara derajat keberdayaan dan basis keberdayaan. Bagian ini mendeskripsikan indeks gabungan untuk kasus di Kota Banjarmasin.

Lampiran 4, menunjukkan variasi tingkat ketercapaian derajat dan basis keberdayaan. Secara kumulatif, indeks tingkat keberdayaan masyarakat pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin mencapai 49,94% (berada di bawah ambang batas minimal). Dengan demikian, baik berdasarkan indeks tunggal maupun kumulatif, Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) belum layak disebut sebagai program pemberdayaan.

### **Kesimpulan**

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara indeks tunggal (derajat

dan basis keberdayaan) belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat (derajat dan basis keberdayaan)

- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara indeks komposit (gabungan dari derajat dan basis keberdayaan) juga belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat (derajat dan basis keberdayaan) sehingga program tersebut belum layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.

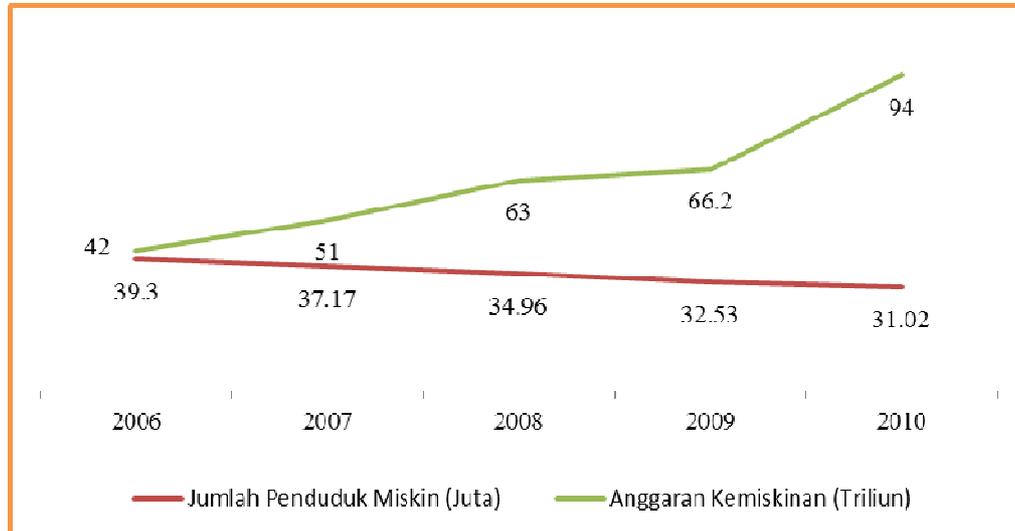
### **Daftar Pustaka**

- Babbie, Earl, 1992. *The Practice Of Social Research*. Wadsworth Publishing. California. USA
- Soebiyanto, FX., 1998, *Peran Kelompok Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusah*. IPB. Bogor
- \_\_\_\_\_, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Ife, Jim 2008. *Community Development*. Terjemahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Sarman, Mukhtar, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Pustaka FISIP UNLAM, Banjarmasin
- Singarimbun, Masri dan Sopyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES (Edisi Revisi), Jakarta.
- Subiyantoro, 2007. *Peran Pemerintah Daerah di Era otonomi daerah dalam Pengerantasan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gerbang Mas-Taskin Kabupaten Lumajang Jawa Timur)*. UNIBRAW. Malang
- Suharto, Edi, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syakrani, 2011, *Memajukan Kesejahteraan bagi semua "Perspektif Pemberdayaan Masyarakat"*. FISIP Unlam. Banjarmasin.
- Utomo, Hadi, 2011. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di desa Gudang Hirang Kab. Banjar )*. MSAP UNLAM. Banjarbaru
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

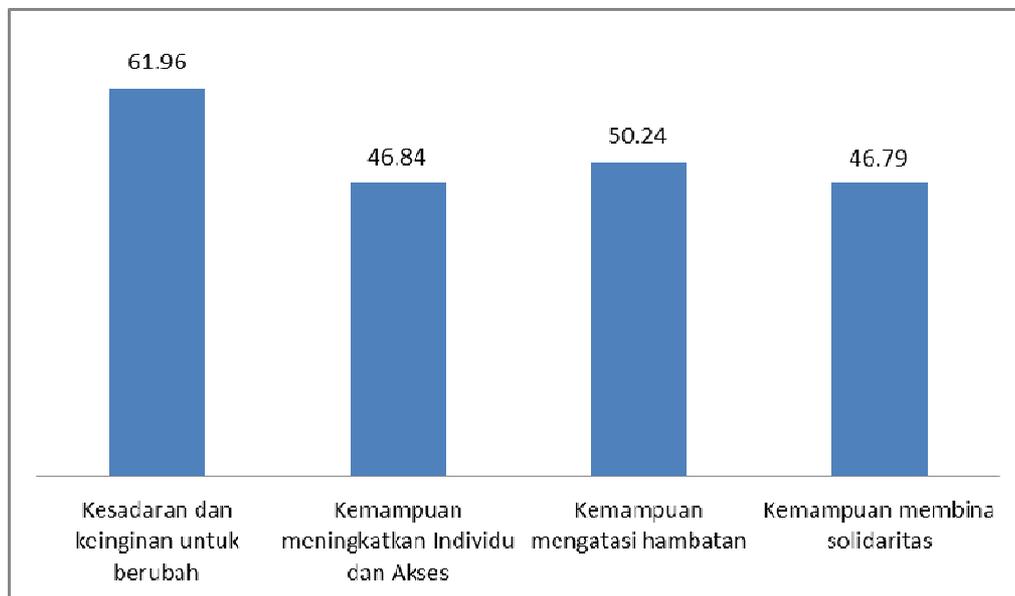
## Lampiran

Lampiran 1. Perbandingan antara Anggaran Kemiskinan (triliun) & Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) tahun 2006 - 2010



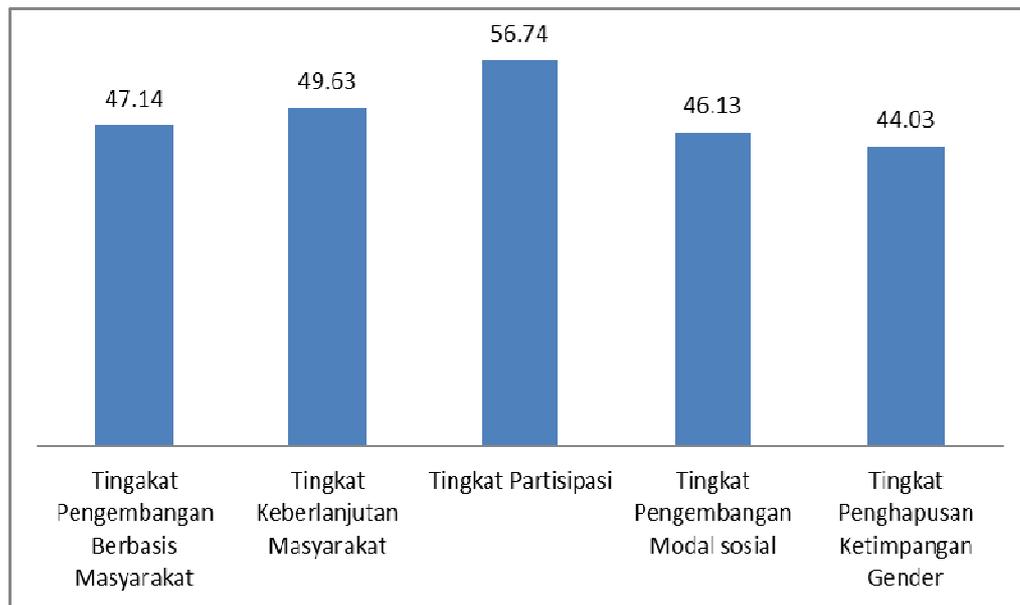
Sumber : BPS dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011

Lampiran 2. Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat dalam Program 232FM di Kota Banjarmasin



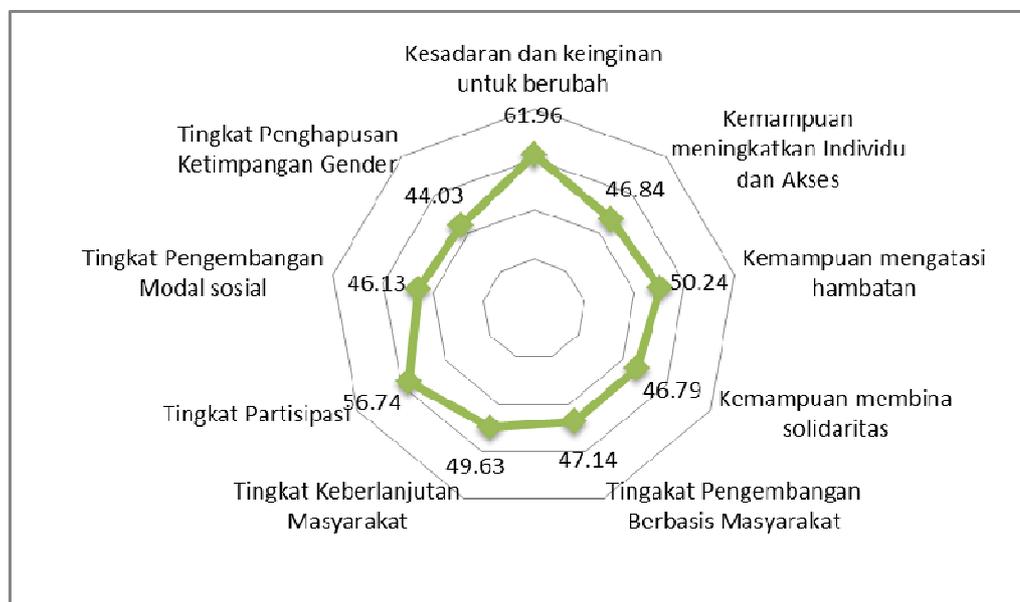
Sumber : Pengolahan Data Primer 2012

Lampiran 3. Indeks Basis Keberdayaan Masyarakat dalam Program P2FM di Kota Banjarmasin



Sumber : pengolahan data primer 2012

Lampiran 4. Indeks Komposit Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin



Sumber : pengolahan data primer 2012